



**#SIKEP**  
SANTUN  
INTEGRITAS  
KREATIF  
EMPATI  
PROFESIONAL

TRAPSILA  
ADHYAKSA  
**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonisoyal Adaptif Kolaboratif

**bangga**  
melayani  
**bangsa**

# PENETAPAN TARGET KINERJA

# TAHUN 2024



# KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

[www.kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id)



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG**

---

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  8. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun



2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517);

9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Target Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2024 dan Rencana Aksi/Strategi Nasional yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Target Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I (satu) sampai dengan Lampiran VI (enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini.

KETIGA : Pelaksanaan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024 wajib diselaraskan dengan Tema dan pemenuhan Tujuh Agenda Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.



- KEEMPAT : Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024 sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- KELIMA : Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 05 Maret 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG



HELMY, S.H., M.H.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

Kepala Kejaksaan Negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024		RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Kinerja Tambahan
			Rencana Strategis	Proyeksi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	90%	100%	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	99%	100%	Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya		
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	90%	95%			



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024		RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Kinerja Tambahan
			Rencana Strategis	Proyeksi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	<p>Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana</p> <p>Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata</p>	85%	95%	<p>Saing.</p> <p>4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.</p> <p>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.</p> <p>7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.</p>		3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Bandar Lampung, 05 Maret 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



HELMI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 196702191994031002



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 TAHUN 2024

Bidang: Subbagian Pembinaan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>SP.1</b> Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	<b>IKU 1.1</b> Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal	<b>Faktor Pembilang:</b> Realisasi anggaran  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah pagu anggaran  X 100	95%	95%	<b>SS 2.2</b> Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>IKU 1.2</b> Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	95	100	<b>SS 2.2</b> Persentase Nilai SAKIP Kejaksaaan Republik Indonesia	pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
2.	<b>SP.2</b> Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia	<b>IKU 2.1</b> Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah sarana dan prasarana X 100	90%	100%	<b>SS 6.1</b> Persentase Satuan Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis TI	
3.	<b>SP.3</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaaan	<b>IKU 3.1</b> Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaaan Tinggi	B	BB	<b>SS 2.2</b> Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Republik Indonesia	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi				Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia	Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.

Bandar Lampung, 05 Maret 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



HELMI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama NIP. 196702191994031002



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 TAHUN 2024

Bidang: Seksi Bidang Intelijen

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>SP.1</b> Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	<b>IKU 1.1</b> Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu  <b>Faktor Penyebut:</b> Surat perintah pengamanan pembangunan strategis  X 100	90%	100%	<b>SS. 3.1</b> Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024:  1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.  2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	<b>SP.2</b> Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	<b>IKU 2.1</b> Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	<p><b>1. Faktor Pembilang:</b> Jumlah penerima penerangan hukum</p> <p><b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah target penerima penerangan hukum X 100</p> <p><b>2. Faktor Pembilang:</b> Jumlah penerima penyuluhan hukum</p> <p><b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah target penerima penyuluhan hukum X 100</p>	40%	100%	<b>SS. 3.1</b> Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	<p>Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.</p> <p>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.</p> <p>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.</p> <p>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.</p> <p>7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.</p>
3.	<b>SP.3</b> Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi	<b>IKU 3.1</b> Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/	<p><b>Faktor Pembilang:</b> Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu</p> <p><b>Faktor Penyebut:</b> Surat perintah LIDPAMGAL yang</p>	100%	100%	<b>SS. 3.1</b> Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	diterbitkan X 100			Tindak Pidana Korupsi	
		<b>IKU 3.2</b> Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	<b>Faktor Pembilang:</b> Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu  <b>Faktor Penyebut:</b> Surat perintah PAKEM yang diterbitkan  X 100	100%	100%	<b>SS. 3.1</b> Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	

Bandar Lampung, 05 Maret 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



**HELMI, S.H., M.H.**  
Jaksa Utama Pratama NIP. 196702191994031002



LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 TAHUN 2024

Bidang: Seksi Bidang Tindak Pidana Umum

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>SP.1</b> Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	<b>IKU 1.1</b> Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan  X 100	70%	100%	<b>SS. 4.1</b> Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan  Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
2.	<b>SP.2</b> Meningkatnya	<b>IKU 2.1</b> Persentase	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara yang berhasil	95%	100%	<b>SS. 4.1</b> Persentase	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	diselesaikan hingga pra penuntutan <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara yang ditangani			Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi
		<b>IKU 2.2</b> Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara yang ditangani	95%	100%	<b>SS. 4.1</b> Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		<b>IKU 2.1</b> Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van</i>	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) <b>Faktor Penyebut:</b>	95%	100%	<b>SS. 4.1</b> Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100				Pelayanan Publik.

Bandar Lampung, 05 Maret 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



HELMI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama NIP. 196702191994031002



LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 TAHUN 2024

Bidang: Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>SP.1</b> Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	<b>IKU.1.1</b> Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	<b>Faktor pembilang:</b> Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan  X 100	90%	95%	<b>SS. 4.2</b> Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan  Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024:
		<b>IKU.1.2</b> Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	90%	95%	<b>SS. 4.2</b> Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.  2. Mengembangkan Wilayah



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			X 100				untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
		<b>IKU.1.3</b> Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan X 100	90%	95%	<b>SS. 4.2</b> Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
		<b>IKU.1.4</b> Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan X 100	90%	95%	<b>SS. 4.2</b> Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.
		<b>IKU.1.5</b>	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan	90%	95%	<b>SS. 4.2</b> Persentase	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan  <b>Faktor Penyebut:</b>  Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan  X 100			Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		<b>IKU.1.6</b> Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<b>Faktor Pembilang:</b>  Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)  <b>Faktor Penyebut:</b>  Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)  X 100	97%	95%	<b>SS. 4.2</b>  Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		<b>IKU.1.7</b> Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	<b>Faktor Pembilang:</b>  Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi	97%	97%	<b>SS. 5.1</b>  Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Melalui Jalur Pidana Khusus	<p><b>Faktor Penyebut:</b></p> <p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap X 100</p>			Negara Melalui Jalur Pidana	
2.	<p><b>SP.2</b></p> <p>Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional</p>	<p><b>IKU.2.1</b></p> <p>Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan</p>	<p><b>Faktor Pembilang:</b></p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> <p><b>Faktor Penyebut:</b></p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan X 100</p>	90%	95%	<p><b>SS. 4.2</b></p> <p>Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	
		<p><b>IKU.2.2</b></p> <p>Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang</p>	<p><b>Faktor Pembilang:</b></p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p><b>Faktor Penyebut:</b></p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus</p>	90%	95%	<p><b>SS. 4.2</b></p> <p>Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi</p>	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	(kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap penuntutan X 100				
		<b>IKU.2.3</b> Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100	90%	95%	<b>SS. 4.2</b> Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	

Bandar Lampung, 05 Maret 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



HELMI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama NIP. 196702191994031002



LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 TAHUN 2024

Bidang: Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>SP.1</b> Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<b>IKU 1.1</b> Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan X 100	80%	90%	<b>SS. 5.2</b> Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan  Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024:
		<b>IKU 1.2</b> Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun	80%	90%	<b>SS. 5.2</b> Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			berjalan X 100				Menjamin Pemerataan.
		<b>IKU 1.3</b> Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan X 100	80%	90%	<b>SS. 5.2</b> Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
2.	<b>SP.2</b> Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	<b>IKU 2.1</b> Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata X 100	80%	90%	<b>SS. 5.2</b> Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	<b>SP.3</b> Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	<b>IKU 3.1</b> Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%	100%	<b>SS.3.1</b> Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	

Bandar Lampung, 05 Maret 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



HELMI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama NIP. 196702191994031002



LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
 TAHUN 2024

Bidang: Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SP.1 Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	<b>IKU 1.1</b> Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	<b>Faktor Pembilang:</b> Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan  <b>Faktor Penyebut:</b> Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani  X 100	95%	95%	<b>SS.5.1</b> Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan  Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
		<b>IKU 1.2</b> Persentase	<b>Faktor Pembilang:</b> Nilai barang rampasan, sita eksekusi	95%	95%	<b>SS.5.1</b>	



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p>dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/ lembaga, lintas negara</p> <p><b>Faktor Penyebut:</b></p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian / lembaga, lintas negara</p> <p>X 100</p> <p><b>Faktor Pembilang:</b></p> <p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya,</p>			Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	<p>`Berkeadilan.</p> <p>2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.</p> <p>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> <p>4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.</p> <p>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.</p> <p>7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan</p>



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p><b>Faktor Penyebut:</b>                      Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian / lembaga, lintas negara</p> <p>X 100</p>				Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.
			<p><b>Faktor Pembilang:</b>                      Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan Kas Daerah dan yang dimanfaatkan PSP dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p><b>Faktor Penyebut:</b>                      Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan putusan pengadilan yang <i>inkracht van</i></p>				



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024
				Rencana Strategis	Proyeksi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih X 100				

Bandar Lampung, 05 Maret 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



HELMI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama NIP. 196702191994031002

